



# Strategi Manajemen Risiko dan Komunikasi Krisis dalam Penanggulangan Bencana

(Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Dompu)

Ryan Eka Saputra<sup>1\*</sup>, Samsudin<sup>2</sup>, Fahrudin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ryanbalibunga@gmail.com](mailto:ryanbalibunga@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to explore the risk management and crisis communication strategies implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Dompu Regency in addressing the threat of hydrometeorological disasters resulting from massive land-use conversion for corn cultivation. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis of key informants. The results indicate that disaster management at the Dompu Regency BPBD faces significant challenges regarding regulations and infrastructure, yet these are successfully mitigated through the strength of community communication and social capital. In the pre-disaster phase, the BPBD faced a structural dilemma because it lacked the legal authority to prohibit the conversion of forest land upstream, forcing strategies to shift toward temporary management downstream. Meanwhile, signal limitations during extreme weather were successfully addressed through a hybrid communication model that combined digital technology with local wisdom, such as the beating of gongs and the use of mosque loudspeakers by village officials. Finally, classic challenges such as the fluctuating dynamics of refugee data and the limited availability of heavy machinery during the post-disaster phase were effectively mitigated thanks to community-based data validation at the village level and the high level of community cooperation in accelerating self-reliant environmental recovery.*

**Keywords:** *Crisis Communication; Hydrometeorological Disasters; Local Wisdom; Risk Management; Social Capital.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi manajemen risiko dan komunikasi krisis yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat alih fungsi lahan jagung yang masif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bencana di BPBD Kabupaten Dompu menghadapi tantangan besar pada aspek regulasi dan infrastruktur, namun berhasil disiasati melalui kekuatan komunikasi komunitas dan modal sosial. Pada tahap pra-bencana, BPBD mengalami dilema struktural karena tidak memiliki wewenang hukum untuk melarang alih fungsi lahan hutan di hulu, sehingga strategi terpaksa digeser ke penanganan sementara di hilir. Sementara itu, keterbatasan sinyal saat cuaca ekstrem berhasil diatasi melalui pola komunikasi hibrida yang menggabungkan teknologi digital dengan kearifan lokal, seperti pemukulan kentongan dan pengeras suara masjid oleh perangkat desa. Terakhir, kendala klasik berupa dinamika data pengungsi yang berubah-ubah serta keterbatasan armada alat berat pada tahap pasca-bencana dapat dimitigasi dengan baik berkat adanya validasi data berbasis komunitas di tingkat desa dan tingginya semangat gotong royong warga dalam mempercepat pemulihan lingkungan secara mandiri.

**Kata kunci:** Bencana Hidrometeorologi; Kearifan Lokal; Komunikasi Krisis; Manajemen Risiko; Modal Sosial.

## 1. LATAR BELAKANG

Secara geografis, Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki lanskap topografi yang unik namun menyimpan kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman geologis dan klimatologis. Namun, ancaman terbesar saat ini bukan sekadar faktor alamiah, melainkan intervensi manusia. Dalam satu dekade terakhir, wilayah Dompu mengalami transformasi ekologis yang signifikan akibat ekspansi masif lahan pertanian, khususnya untuk komoditas jagung, yang merambah hingga ke area hutan lindung dan kemiringan terjal. Data

Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB mencatat lonjakan produksi jagung yang berkorelasi dengan pembukaan lahan baru, yang secara fundamental mengubah fungsi hidrologis kawasan (BPS NTB, 2023). Hilangnya vegetasi penyangga ini menurunkan kapasitas infiltrasi tanah secara drastis, menciptakan kerentanan ekologis baru yang mengubah pola bencana di wilayah tersebut.

Konsekuensi dari degradasi lingkungan ini bermuara pada peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Fenomena banjir bandang dan tanah longsor di Dompu kini bertransformasi dari kejadian insidental menjadi siklus tahunan yang dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusumasari, (2014) yang menyebutkan bahwa kegagalan manajemen bencana di tingkat daerah sering kali bermula dari ketidakmampuan mengendalikan faktor risiko antropogenik. Kondisi ini dipertegas oleh temuan Priatna *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa perubahan tata guna lahan yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan akan mengakibatkan gangguan permanen pada siklus hidrologi sehingga memicu bencana yang berulang. Bencana di Dompu adalah konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi antara tekanan ekonomi pertanian dan kerapuhan struktur lingkungan, menuntut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang komprehensif. Sebagaimana ditekankan oleh Gusti & Salam, (2026) pergeseran strategi ke arah manajemen risiko yang terintegrasi menjadi syarat mutlak bagi institusi daerah untuk mewujudkan resiliensi wilayah dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.

Urgensi penelitian ini terkonfirmasi oleh data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 yang dirilis BNPB, di mana Kabupaten Dompu konsisten berada pada skor risiko tinggi (>150). Kondisi ini diperparah oleh fakta lapangan di mana ribuan hektar area tangkapan air telah beralih fungsi, yang secara langsung berdampak pada wilayah hilir seperti Kecamatan Woja, Hu'u, Manggelewa, Kilo, dan Kempo. Studi terdahulu oleh Subiyakto, (2024) menekankan bahwa tingginya indeks risiko tanpa diimbangi kapasitas kelembagaan yang memadai akan menciptakan jebakan kerentanan yang sulit diputus. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan BPBD menjadi variabel penentu keselamatan publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengamanatkan pergeseran paradigma dari tanggap darurat menuju Pengurangan Risiko Bencana (PRB), implementasi di daerah sering kali mengalami distorsi. Lestari *et al.*, (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak BPBD di Indonesia masih terjebak pada pola pikir birokrasi yang kaku dan kekurangan anggaran mitigasi. Di Dompu, tantangan ini semakin kompleks karena BPBD harus berhadapan dengan dilema kultural masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor

pertanian pemicu risiko tersebut. Di sinilah letak pentingnya meneliti "Strategi" sebagai sebuah proses adaptasi institusi terhadap tekanan lingkungan dan sosial.

Selain aspek manajemen fisik, elemen penting yang sering menjadi titik lemah adalah komunikasi krisis. Strategi komunikasi krisis pada BPBD Kabupaten Dompu merupakan instrumen penting dalam mitigasi bencana yang harus menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat di lapangan. Dalam praktiknya, BPBD Dompu dituntut untuk mampu mengelola alur informasi yang akurat guna meredam ketidakpastian dan potensi kepanikan massal saat keadaan darurat terjadi. Tantangan utamanya terletak pada sinkronisasi antara penggunaan teknologi informasi untuk peringatan dini dengan pendekatan sosiokultural melalui kearifan lokal agar pesan evakuasi dapat diterima secara efektif oleh masyarakat di daerah terpencil. Dengan mengintegrasikan protokol komunikasi yang transparan dan kolaborasi lintas sektoral, BPBD tidak hanya berfungsi sebagai unit penyelamat fisik, tetapi juga sebagai pusat informasi terpercaya yang mampu meminimalisir risiko sosial akibat disinformasi atau hoaks selama periode krisis.

Dalam situasi bencana, informasi adalah kebutuhan vital setara logistik. Namun, efektivitas komunikasi di Dompu menghadapi paradoks teknologi. Adanya wilayah *blank spot* di area pelosok yang menghambat peringatan dini, bersanding dengan arus informasi yang terlalu cepat dan sering kali tidak terverifikasi di wilayah perkotaan. Penelitian Juditha, (2018) menunjukkan bahwa sirkulasi hoaks saat bencana dapat meningkatkan kepanikan dan menghambat proses evakuasi. Sementara itu, Noor *et al.*, (2022) menyoroti pentingnya integrasi kearifan lokal dalam komunikasi bencana agar pesan lebih mudah diterima masyarakat. Ketimpangan kapasitas komunikasi ini menjadi celah yang harus diisi oleh strategi komunikasi kritis BPBD. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah irisan antara manajemen risiko akibat alih fungsi lahan dengan strategi komunikasi krisis di daerah dengan karakteristik seperti Dompu. Penelitian terdahulu seperti (Danil, 2021) lebih banyak membahas manajemen pada fase tanggap darurat, sedangkan (Rahmawati *et al.*, 2025) berfokus pada peran media sosial secara umum tanpa melihat konteks birokrasi lokal.

Berdasarkan paparan fenomena di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana BPBD Kabupaten Dompu merumuskan strategi manajemen risiko di tengah kompleksitas masalah lingkungan, serta bagaimana pola komunikasi krisis dibangun untuk menjembatani kesenjangan informasi. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan model penanggulangan bencana yang adaptif, partisipatif, dan relevan dengan realitas sosiologis masyarakat Kabupaten Dompu.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Konseptualisasi Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana merupakan sebuah pendekatan sistematis yang mengintegrasikan keputusan administratif, kekuatan organisasi, serta kecakapan operasional untuk mengimplementasikan strategi penanggulangan dampak bencana secara menyeluruh. Dasar manajemen risiko tidak lagi dipandang sebagai sekadar tindakan atau respons sesaat pasca-kejadian, melainkan sebuah siklus berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat resiliensi masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana. Berdasarkan kerangka kerja internasional seperti *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, manajemen risiko yang efektif menuntut pemahaman mendalam mengenai interaksi antara bahaya, tingkat kerentanan, serta kapasitas suatu daerah dalam menghadapi potensi ancaman. Purnawan, (2026) yang menekankan bahwa integrasi data risiko yang akurat merupakan fondasi utama dalam meminimalkan dampak fatalitas bencana di tingkat lokal.

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, penerapan manajemen risiko bencana menuntut adanya transformasi struktural yang mengubah paradigma aparatur dari gaya kerja tanggap darurat menuju pengurangan risiko. Hal ini melibatkan penguatan basis data spasial mengenai zona rawan bencana serta pengalokasian sumber daya yang tepat guna untuk memitigasi dampak sosioekonomi yang ditimbulkan. Apsari, (2025) menyatakan bahwa pergeseran paradigma ini memerlukan komitmen kepemimpinan daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan peta risiko bencana. BPBD sebagai garda terdepan di tingkat kabupaten harus mampu menerjemahkan kebijakan makro menjadi langkah-langkah taktis yang adaptif terhadap karakteristik wilayahnya. Ramadhika *et al.*, (2025) menambahkan bahwa kemampuan adaptasi birokrasi dalam merespons dinamika lingkungan menjadi kunci keberhasilan mitigasi di daerah dengan kerentanan tinggi. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik yang menjamin keberlangsungan pembangunan daerah di tengah ketidakpastian kondisi lingkungan.

Keberhasilan dari konsep manajemen risiko sangat bergantung pada integrasi antara aspek teknokratis dan partisipasi masyarakat. Strategi penanggulangan bencana tidak akan mencapai efisiensi maksimal jika hanya mengandalkan intervensi fisik atau struktural tanpa menyentuh penguatan kapasitas warga. Kurnia & Pandjaitan, (2021) menegaskan bahwa literasi bencana masyarakat merupakan variabel penentu yang mempercepat proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam penelitian ini dipandang sebagai proses pembelajaran sosial di mana pemerintah daerah dan masyarakat berkerjasama dalam mengidentifikasi ancaman, mengurangi kelemahan, dan membangun ketangguhan secara

mandiri. Menurut Haryono, (2019), sinergi antara otoritas lokal dan komunitas akar rumput mampu menciptakan sistem deteksi dini yang lebih responsif dibandingkan pendekatan *top-down*. Melalui sinergi ini, manajemen risiko bencana bertransformasi menjadi sebuah sistem pertahanan dalam wilayah.

Strategi pencegahan dalam manajemen risiko bencana merupakan upaya yang mengintegrasikan pendekatan struktural dan non-struktural guna meminimalisir potensi dampak kerusakan di masa depan. Mitigasi struktural berfokus pada pembangunan fisik yang bersifat teknis seperti normalisasi aliran sungai, pengadaan jalur evakuasi, dan konservasi lahan di wilayah hulu Kabupaten Dompu. Anggraini *et al.*, (2025) berpendapat bahwa efektivitas mitigasi struktural di wilayah hulu sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum lingkungan. Sementara mitigasi non-struktural lebih mengedepankan aspek penguatan regulasi, penyusunan peta rawan bencana, serta peningkatan literasi masyarakat dalam menghadapi ancaman. Khairina *et al.*, (2024) menyebutkan bahwa kebijakan non-struktural seperti edukasi kebencanaan berkelanjutan memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan dalam membentuk budaya sadar bencana. Melalui sinergi kedua instrumen ini, proses penanggulangan bencana di tingkat daerah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan beralih menjadi sebuah sistem perlindungan publik yang terencana terhadap karakteristik kerentanan di wilayah setempat. Sebagaimana ditekankan oleh (Gusri, 2025), integrasi mitigasi fisik dan penguatan regulasi lokal adalah strategi terbaik dalam menghadapi ketidakpastian iklim yang ekstrem di wilayah kepulauan.

### **Komunikasi Krisis**

Komunikasi krisis adalah pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk menangani situasi krisis. Komunikasi krisis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu merupakan rangkaian strategi penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan terpadu untuk meminimalkan dampak bencana serta mengelola persepsi publik selama fase darurat. Mengingat karakteristik wilayah Dompu yang rentan terhadap banjir dan tanah longsor, BPBD berperan sebagai pusat informasi yang harus mampu meredam kepanikan warga melalui instruksi evakuasi yang jelas dan koordinasi lintas sektoral. Sebagaimana ditegaskan oleh (Suci, 2021) dalam studinya di Kabupaten Dompu, "faktor komunikasi sangat diperlukan dalam menangani suatu bencana; tanpa adanya komunikasi yang efektif, penanganan bencana tidaklah lancar." Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan krisis di lapangan sangat bergantung pada bagaimana pesan keselamatan didistribusikan secara merata kepada masyarakat terdampak.

Dalam perspektif yang lebih luas, efektivitas komunikasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi dan keterlibatan komunitas lokal untuk memastikan pesan sampai ke wilayah pelosok. Sari, (2025) mengungkapkan bahwa digitalisasi informasi bencana melalui media sosial menjadi krusial dalam mempercepat respon darurat dan membangun kepercayaan publik terhadap otoritas terkait. Selain itu, Ulmer *et al.*, (2022) dalam literatur manajemen krisis terbaru menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus bersifat transparan dan mampu mengubah ancaman menjadi peluang untuk edukasi jangka panjang. Dengan menggabungkan kearifan lokal dan sistem peringatan dini modern, BPBD Kabupaten Dompu berupaya menciptakan ketahanan masyarakat yang lebih adaptif terhadap potensi bencana yang berulang setiap tahunnya.

### **Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah bencana terjadi. Penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Dompu merupakan serangkaian upaya terpadu yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Di wilayah Dompu, fokus utama diarahkan pada mitigasi ancaman rutin seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan yang kerap dipicu oleh degradasi lahan serta perubahan iklim. Menurut Suci, (2021) penanggulangan bencana di daerah ini memerlukan sinergi operasional yang kuat, di mana "koordinasi antar-anggota tim reaksi cepat menjadi penentu utama dalam keberhasilan penyelamatan korban di titik-titik rawan." Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bukan sekadar aksi teknis, melainkan manajemen sumber daya yang responsif terhadap karakteristik geografis Dompu.

Efektivitas penanggulangan bencana juga bergantung pada penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan kesiapsiagaan dini. Dinarwati & Hidayat, (2023) dalam studinya mengenai resiliensi wilayah NTB menyatakan bahwa integrasi pengetahuan lokal ke dalam sistem peringatan dini sangat penting untuk mempercepat waktu reaksi masyarakat saat bencana terjadi. Selain itu, (Ritonga, 2024) menekankan bahwa manajemen bencana yang modern harus mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan logistik agar tidak terjadi konflik sosial di tengah situasi krisis. Dengan menggabungkan kesiapan logistik, regulasi yang ketat, dan pelibatan aktif komunitas, BPBD Kabupaten Dompu berupaya menciptakan ekosistem penanggulangan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif demi meminimalisir risiko kerugian materi maupun jiwa.

## Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi komunikasi risiko dan mitigasi bencana telah diimplementasikan melalui berbagai kanal, mulai dari pendekatan teknologi hingga pelibatan komunitas. Lahi & Suldani (2025) serta Wildani (2023) menyoroti penggunaan media digital, SMS, dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi *real-time* yang cukup efektif di Kota Makassar dan Cilegon. Di sisi lain, Alfarabi & Adhrianti (2023) menekankan pentingnya pemetaan risiko berbasis *Customer Focus* di Bengkulu Tengah melalui media cetak dan regulasi bangunan. Berbagai program seperti pembentukan desa tangguh bencana, sosialisasi zona risiko, dan edukasi visual untuk anak sekolah juga telah dijalankan guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal (Iqbal *et al.*, 2021). Namun demikian, efektivitas penanggulangan bencana masih kerap terhambat oleh kendala teknis dan manajerial. Lahi & Suldani (2025) serta Sari & Yuniningsih (2019) mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, fragmentasi informasi, serta sistem peringatan dini yang tidak memadai menjadi penghalang utama dalam mitigasi. Masalah internal organisasi, seperti belum adanya tim komunikasi khusus dan belum dijadikannya mitigasi sebagai prioritas utama, juga ditemukan di BPBD Provinsi Jawa Barat (Iqbal *et al.*, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh adanya kesenjangan antara pesan kebijakan dengan realitas penanganan di lapangan, yang menurut (Fattricia *et al.*, 2025) dapat menghambat pemulihan kepercayaan publik. Oleh karena itu, integrasi koordinasi antarinstansi dan komunikasi kebijakan yang transparan menjadi elemen penting untuk menutup celah antara perencanaan dan implementasi penanggulangan bencana.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi strategi manajemen risiko dan komunikasi krisis di BPBD Kabupaten Dompu. Menurut (Sugiyono, 2020) metode kualitatif sangat tepat digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang terjun langsung ke lapangan guna membangun kedekatan dengan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, seperti kepala pelaksana, staf teknis kebencanaan, Relawan atau Toko Masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di lokasi penelitian, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi penanggulangan bencana. Pengumpulan data ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk menangkap realitas manajemen risiko yang terjadi di wilayah tersebut.

Proses analisis data dilakukan dengan melalui reduksi data untuk menyaring informasi esensial, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola komunikasi yang ditemukan (Sugiyono, 2021). Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan agar terhindar dari bias, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pernyataan antar-informan serta triangulasi teknik melalui pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen tertulis. Merujuk pada pemikiran (Sugiyono, 2022) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data. Seluruh rangkaian metodologi ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang valid mengenai efektivitas koordinasi BPBD Kabupaten Dompu dalam menghadapi situasi krisis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi strategi manajemen risiko dan komunikasi krisis yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Dompu melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian dikategorikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu:

##### **Strategi Manajemen Risiko**

Strategi manajemen risiko yang diterapkan BPBD Kabupaten Dompu saat ini berada pada titik nadir antara upaya pelestarian lingkungan dan desakan ekonomi pertanian jagung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah mengidentifikasi alih fungsi lahan di wilayah hulu sebagai pemicu utama bencana hidrometeorologi, namun instrumen kebijakan yang dimiliki masih bersifat defensif. BPBD cenderung memprioritaskan mitigasi struktural di area hilir, seperti pembangunan cek dam dan perkuatan tanggul sungai di Kecamatan Woja, sebagai langkah cepat meredam luapan air. Namun, langkah ini dinilai hanya mengobati gejala tanpa menyentuh akar permasalahan yang berada di kawasan hutan lindung.

*"Terkait mitigasi banjir bandang yang dipicu oleh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan jagung di wilayah hulu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD telah melakukan pemetaan risiko, namun secara regulasi tidak memiliki kewenangan kebijakan untuk melarang aktivitas menanam warga karena hal tersebut berada di bawah otoritas sektor kehutanan pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, sebagai langkah kesiapsiagaan jangka pendek, strategi yang dapat ditempuh saat ini berfokus pada upaya taktis untuk 'menahan' laju air di wilayah hilir agar tidak langsung menyapu pemukiman warga, meskipun disadari bahwa langkah tersebut*

*hanyalah penanganan sementara dan bukan solusi permanen untuk mengatasi akar masalah di hulu" (Informan: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan)*

### **Komunikasi Krisis**

Strategi komunikasi krisis BPBD Dompu didesain secara bersamaan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur digital antara pusat kota dan wilayah pelosok. Penelitian menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi melalui media sosial resmi dan WhatsApp Group koordinasi sudah berjalan cukup baik untuk distribusi informasi internal. Namun, tantangan muncul pada transmisi pesan ke wilayah *blank spot* seperti di pedalaman Kecamatan Hu'u atau Kempo. Di sinilah BPBD menggunakan strategi komunikasi berjenjang dengan mengandalkan relawan lokal dan perangkat desa sebagai penyambung lidah otoritas kepada masyarakat yang terisolasi secara digital.

*"Kendala utama kami saat terjadi bencana adalah hilangnya sinyal komunikasi secara total di beberapa desa ketika hujan deras, sehingga strategi kedaruratan yang kami lakukan adalah mengirimkan pesan peringatan dini (Early Warning System) kepada Kepala Desa selagi jaringan masih tersedia. Selanjutnya, aparat desa atau relawan akan menyebarkan peringatan tersebut secara manual menggunakan kearifan lokal seperti memukul kentongan atau lewat pengeras suara masjid, dengan memanfaatkan istilah lokal setempat agar warga dapat langsung memahami bahwa air telah mencapai level bahaya dan segera melakukan evakuasi." (Informan: Kabid Kedaruratan dan Logistik)*

### **Penanggulangan Bencana**

Pada fase penanggulangan, strategi koordinasi antar-lembaga dalam Tim Reaksi Cepat menjadi variabel penentu keberhasilan evakuasi. BPBD berperan sebagai instansi yang mengantar kerjasama baik TNI, Polri, dan instansi sosial dalam distribusi logistik dan penyelamatan korban. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komando di Dompu telah berjalan secara organik melalui ikatan emosional antar-petugas, namun masih memerlukan penguatan dalam hal SOP integrasi data pengungsi agar bantuan lebih merata. Sinergi ini juga mencakup keterlibatan aktif organisasi pemuda dan pramuka sebagai lini depan dalam pendataan warga terdampak.

*"Meskipun koordinasi kedaruratan di lapangan berjalan kompak, dinamika data pengungsi yang berubah-ubah sering kali menjadi tantangan dalam distribusi logistik pemulihan, sehingga kami sangat terbantu oleh pihak desa yang secara proaktif memvalidasi data kerusakan rumah warga sebagai dasar penentuan bantuan rekonstruksi. Selain itu, dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana, kami sangat*

*mendukung pemanfaatan kearifan lokal seperti gotong royong warga untuk pembersihan material lumpur secara mandiri, yang secara efektif melengkapi keterbatasan armada alat berat kabupaten dalam mengembalikan fungsi lingkungan pemukiman" (Informan: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi)*

## **Pembahasan**

### ***Strategi Manajemen Risiko di BPBD Kabupaten Dompu***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko BPBD Kabupaten Dompu menghadapi dilema struktural akibat keterbatasan wewenang regulasi dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan jagung di wilayah hulu. Berdasarkan pernyataan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, keterbatasan ini memaksa BPBD mengambil langkah defensif dengan berfokus pada mitigasi struktural di hilir seperti pembangunan cek dam dan perkuatan tanggul di Kecamatan Woja meskipun disadari langkah tersebut hanyalah penanganan sementara. Fenomena keterbatasan otoritas lokal dalam tata kelola bencana ini sejalan dengan kajian (Ulya *et al.*, 2021) yang menegaskan bahwa ego sektoral dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah daerah dan sektor kehutanan provinsi sering kali melumpuhkan efektivitas mitigasi bencana hidrometeorologi sejak dari hulu. Kusumasari, (2014) dalam penelitiannya tentang manajemen risiko berbasis wilayah menyatakan bahwa pendekatan mitigasi yang hanya berfokus pada pembangunan fisik di hilir tanpa menyembuhkan kerusakan ekologis di hulu terbukti tidak akan pernah menjadi solusi permanen dan justru meningkatkan biaya penanggulangan jangka panjang. Oleh karena itu, ketidakberdayaan regulatif BPBD Dompu ini memperkuat teori (Mahatma, 2025) mengenai pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam manajemen bencana, di mana keberhasilan pemetaan risiko oleh lembaga penanggulangan bencana daerah mutlak memerlukan intervensi hukum yang tegas dari otoritas kehutanan di tingkat atas untuk menghentikan degradasi lahan.

### ***Komunikasi Krisis di BPBD Kabupaten Dompu***

Berdasarkan hasil temuan, strategi komunikasi krisis BPBD Kabupaten Dompu menunjukkan pola komunikasi hibrida yang memadukan infrastruktur digital dan kearifan lokal demi mengatasi tantangan *blank spot* di wilayah pelosok seperti Kecamatan Pekat dan Kempo. Pemanfaatan media sosial dan WhatsApp Group efektif untuk koordinasi internal, namun kegagalan sinyal saat cuaca ekstrem memaksa BPBD menerapkan komunikasi berjenjang berbasis komunitas melalui perangkat desa dan relawan. Langkah taktis Kabid Kedaruratan dan Logistik yang mengombinasikan *Early Warning System* (EWS) digital di hulu dengan metode analog di hilir seperti pemukiman kentongan, pengeras suara masjid, dan istilah lokal sejalan dengan riset (Andung *et al.*, 2024) yang menegaskan bahwa efektivitas EWS di

wilayah minim infrastruktur sangat bergantung pada integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal setempat agar pesan bahaya dapat langsung dipahami warga. Pendekatan komunikasi berjenjang ini juga memperkuat teori modal sosial dari (Made *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa pelibatan tokoh lokal dan perangkat desa sebagai agen komunikasi terbukti mampu memotong birokrasi dan mempercepat proses evakuasi mandiri di daerah yang terisolasi secara digital. Fenomena kerentanan jaringan komunikasi akibat cuaca buruk di Kabupaten Dompu ini mengonfirmasi kajian dari (Suadnya & Paramita, 2018) yang menunjukkan bahwa daerah dengan topografi berbukit dan rawan bencana di Indonesia mutlak memerlukan mitigasi komunikasi alternatif agar rantai informasi krisis tidak terputus saat teknologi digital mengalami kelumpuhan total.

### ***Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Dompu***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen bencana pada tahap kedaruratan hingga pasca-bencana sangat bergantung pada akurasi data korban dan optimalisasi modal sosial masyarakat guna mengatasi keterbatasan operasional pemerintah. Kendala klasik berupa dinamika data pengungsi yang fluktuatif dan keterbatasan armada alat berat dalam pemulihan fisik berhasil dimitigasi melalui kolaborasi proaktif pemerintah desa dalam validasi data kerusakan rumah serta aktivasi kearifan lokal gotong royong warga untuk pembersihan material sisa bencana. Pola ini sejalan dengan kajian (Hariadi *et al.*, 2019) yang menegaskan bahwa integrasi data terpadu antara pemerintah daerah dan tingkat desa merupakan kunci efisiensi distribusi logistik agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Urgensi keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam penilaian kerusakan pasca-bencana didukung oleh penelitian (Taufik, 2024) yang menyatakan bahwa validasi data berbasis komunitas mempercepat proses birokrasi anggaran rekonstruksi secara signifikan. Terakhir, efektivitas mobilisasi warga secara mandiri dalam pembersihan lingkungan ini memperkuat temuan Widyawati, (2025) bahwa modal sosial berupa kearifan lokal gotong royong bukan hanya sekadar instrumen kultural, melainkan strategi adaptif yang penting untuk menutupi keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh BPBD di daerah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana di BPBD Kabupaten Dompu menghadapi tantangan besar pada aspek regulasi dan infrastruktur, namun berhasil disiasati melalui kekuatan komunikasi komunitas dan modal sosial. Pada tahap pra-bencana, BPBD mengalami dilema struktural karena tidak memiliki wewenang hukum

untuk melarang alih fungsi lahan hutan di hulu, sehingga strategi terpaksa digeser ke penanganan sementara di hilir. Sementara itu, keterbatasan sinyal saat cuaca ekstrem berhasil diatasi melalui pola komunikasi hibrida, yaitu menggabungkan teknologi digital dengan kearifan lokal seperti pemukulan kentongan dan pengeras suara masjid oleh perangkat desa. Terakhir, kendala klasik berupa data pengungsi yang berubah-ubah serta keterbatasan alat berat pada tahap pasca-bencana dapat dimitigasi dengan baik berkat validasi data berbasis komunitas di tingkat desa dan tingginya semangat gotong royong warga dalam mempercepat pemulihan lingkungan.

### Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana ke depan, disarankan agar BPBD Kabupaten Dompu segera membangun koordinasi formal lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan pusat guna melahirkan kebijakan bersama terkait penertiban alih fungsi lahan di wilayah hulu. Selain itu, BPBD perlu memperkuat sistem peringatan dini dengan menyediakan fasilitas komunikasi alternatif berbasis radio komunitas (HT) untuk mengantisipasi kelumpuhan sinyal seluler di daerah rawan. Terakhir, kolaborasi berbasis komunitas yang sudah berjalan baik di tingkat desa harus terus dirawat dan dilembagakan misalnya melalui pelatihan relawan tanggap bencana berkala dan digitalisasi pencatatan data korban di desa agar proses validasi data kerusakan serta pemulihan pasca-bencana dapat berjalan jauh lebih cepat dan akurat.

### DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, S. D., Afandi, A. H., & Utama, J. Y. (2025). Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit, Gresik. *Philosophiamundi*, 3(4), 66–74.
- Andung, P. A., Uding, E. P., & Levis, L. R. (2024). Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Folk Media untuk Komunikasi Krisis Bencana. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 204, 391–401. <https://doi.org/10.32509/wacana.v23i2.4539>
- Alfarabi, A., & Adhrianti, L. (2023). Strategi Komunikasi Resiko Bencana Bagi Upaya Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Pemetaan Resiko Bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 146-158.
- Apsari, N. (2025). Transformasi Kebijakan Publik Pasca Bencana: Studi Kasus Kecamatan Katanga Kota Palu. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2(1), 152–163.
- Dinarwati, S., & Hidayat, T. (2023). Forum Efektivitas Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Subang. *Jurnal Dunia Administrasi Publik*, 5(1), 48–63.
- Danil, M. (2021). *Manajemen Bencana* (Issue November).

- Fattricia, T., Aulia, S., & Riyadi, T. S. (2025). Pemulihan Kepercayaan Publik Pasca Banjir: Studi Kasus Komunikasi Kebijakan BPBD Provinsi DKI Jakarta Dalam Manajemen Krisis. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04).
- Gusri, L. (2025). Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Di Lahan Gambut: Pendekatan Terintegrasi Untuk Ketahanan Lingkungan Lailal Gusri. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(6), 1633–1645.
- Gusti, M., & Salam, R. (2026). Rekonstruksi Ontologi Bencana Banjir di Indonesia : Dari Fatalisme Menuju Resiliensi Berbasis Sains. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(4), 1407–1417. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.323>
- Haryono, B. (2019). Modal Sosial, Mitigasi Bencana dan Tingkat Kesiapan Warga dalam Talenta Conference Series Modal Sosial, Mitigasi Bencana dan Tingkat Kesiapan Warga dalam. *In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 2(3). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.589>
- Hariadi, U., Gunawan, T., & Armawi, A. (2019). Kearifan Lokal Komunitas sebagai Modal Sosial dalam Manajemen Bencana Alam. *Majalah Geografi Indonesia*, 33(2), 1–8. <https://doi.org/10.22146/mgi.48548>
- Iqbal, M., Rahiem, V. A., Fitrananda, C. A., & Yusuf, Y. M. (2021). Komunikasi Mitigasi Bencana: Studi Kasus Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar dalam Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi Akibat Sesar Lembang. *Linimasa: jurnal ilmu komunikasi*, 4(2), 186-194.
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Khairina, S. H., Hans, A., & Arif, I. A. (2024). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Konteks Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kota Makassar. 4(2), 107–128.
- Kurnia, I. A., & Pandjaitan, N. K. (2021). Peranan Modal Sosial dalam Resiliensi Komunitas Rawan Bencana Tsunami (Kasus Dusun Suka Dame, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten). *Urnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 05(01), 85–104.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Gava Media.
- Lestari, P. (2018). Komunikasi bencana: Aspek penting pengurangan risiko bencana. *Yogyakarta: PT Kanisius*.
- Lahi, B., & Suldani, M. R. Y. (2025). Komunikasi risiko bencana: Mendukung ketahanan bencana banjir di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 10(1), 1-18.
- Made, N., Amanda, R., Pramudita, M. A., & Silalahi, J. E. (2024). Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Komunikasi Bencana Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Merapi. *COMMENTATE: Journal of Communication Management*, 4(2), 151–165.
- Mahatma, V. V. (2025). Corny Landscapes : Strategi Adaptasi Petani Gorontalo dalam Corny Landscapes : Strategi Adaptasi Petani Gorontalo dalam Menghadapi Kebijakan Agropolitan Jagung. *Antropologi Indonesia*, 46(1). <https://doi.org/10.7454/jai.v46i1.1204>
- Noor, T. I., Sulistyowati, L., Yudha, E. P., Yusuf, M. N., Nurahman, I. S., Umbara, D. S., ... & Gentzora, B. (2022). Pemetaan Bentuk Adaptasi Bencana Berbasis Masyarakat Di

- Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. *Abdimas Galuh*, 4(1), 162–167.
- Priatna, A., Surya, B., & Syafri, S. (2025). Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Potensi Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Tallo Analysis of The Impact of Land Use Changes on Flood Potential in The Tallo. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(2), 113–125. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6060>
- Purnawan, B. I. (2026). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Pemetaan Risiko Bencana Untuk Perencanaan Kota Tangguh. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(2), 586–593.
- Rahmawati, S., Nur, Z., Lubis, S., & Hamdi, F. (2025). Peran media sosial dalam edukasi dan mitigasi bencana di era digital. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 23–33.
- Rosyida, A., & Nurmasari, R. (2019). Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Geologi di Indonesia Dilihat Dari Jumlah Korban (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018): Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 12-21.
- Ramadhika, M. L., Setianingsih, E. L., Ilmu, F., Politik, I., Diponegoro, U., Suroyo, J. A., Diponegoro, U., Tembalang, K., Semarang, K., Kode, I., & Telepon, P. (2025). Analisis Dynamic Governance Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 15(1), 66–81.
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan kebijakan: Evaluasi efektivitas upaya penanggulangan bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102–127. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>
- Subiyakto, R. (2024). *Partisipasi perempuan dalam program pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas di kalurahan pengkok patuk gunungkidul diy*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, N. A. (2025). *Analisis Komunikasi dalam Penanganan Krisis pada PT Gruti Lestari Pratama di Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Suci, R. (2021). *Strategi Komunikasi Pegawai Bpbd Dalam Penaggulangan/Penanganan Bencana Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.
- Sari, D. R., & Yuniningsih, T. (2019). Manajemen Risiko Bencana Dalam Desa Tangguh Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 0-16.
- Suadnya, I. W., & Paramita, E. P. (2018). *Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Lombok Utara pada Masa Tanggap Darurat Gempa 2018*. 1(3), 97–108.
- Taufik, Z. (2024). Kearifan Lokal Dalam Penanggulanganan Bencana Gempa Bumi Dan Sistem Pewarisannya Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*.

- Ulya, Z., Fitriani, R., & Langsa, U. S. (2021). Synchronization of Disaster Financial Policies in COVID-19 Management. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10059>
- Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2022). *Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity*. Sage Publications.
- Widyawati, B. P. (2025). Koordinasi Stakeholder Dalam Menanggulangi Banjir Bandang Tahun 2023 Di Kabupaten Lahat.
- Wildani, S. (2023). Strategi Komunikasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Cibeber Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*.